

PERAN KOMUNIKASI DALAM PENGEMBANGAN ENERGI SOSIAL MASYARAKAT DI PAPUA

ROLE OF COMMUNICATION IN THE COMMUNITY SOCIAL ENERGY DEVELOPMENT IN PAPUA

¹Indah Sulistiani, ²Sumardjo, ³Ninuk Purnaningsih, ⁴Basita Ginting Sugihen

¹Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

^{2,3,4}Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

Jl. Kamper, Babakan, Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16680

indah_sulistiani20@yahoo.co.id

Diterima : 07 Februari 2017

Direvisi : 29 Mei 2017

Disetujui : 22 Juni 2017

ABSTRACT

The role of communication in development involves various elements related to both internal and external factors of communication. Effective development communication has become important for people in order to acknowledge, and understand the development program launched by the government. The integration of unidirectional (linear) and participatory (converging) communication (converging) models in the empowerment program in rural areas can support the achievement of the set objectives. The purpose of this quantitative research conducted in the regency and city of Jayapura Papua, is to analyse the extent the exact role of communication development in the development of social energy for community empowerment and to analyze the relationship between the role of communication and the social energy in the society. The results showed that: (1) development of social energy is determined by the implementation of the program communication and level of participatory communication; (2) the programs communications and participatory communication exerts a positive impact on the social energy in the society.

Keywords: Program Communication, Participatory Communication, Social Energy, Papua

ABSTRAK

Peran komunikasi dalam pembangunan melibatkan berbagai unsur komunikasi yang berkaitan baik secara internal maupun eksternal. Komunikasi pembangunan yang efektif menjadi penting, agar masyarakat dapat mengetahui, mengerti, dan memahami program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Keterpaduan model komunikasi searah (linier) dan komunikasi partisipatif (konvergen) pada program pemberdayaan di pedesaan dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif ini dilakukan di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura Papua, dan bertujuan untuk menganalisis sejauhmana komunikasi pembangunan berperan secara tepat dalam pengembangan energi sosial untuk pemberdayaan masyarakat dan menganalisis hubungan antara peran komunikasi dengan energi sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengembangan energi sosial ditentukan oleh penerapan komunikasi program dan tingkat komunikasi partisipatif; (2) terdapat pengaruh positif komunikasi program dan tingkat komunikasi partisipatif pada energi sosial masyarakat.

Kata Kunci : Komunikasi Program, Komunikasi Partisipatif, Energi Sosial, Papua

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan memiliki peran utama dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Individu masyarakat sebagai bagian dari masyarakat sosial memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Kearifan lokal, keragaman budaya, adat istiadat, kepercayaan, nilai, dan norma yang diyakini oleh masyarakat merupakan salah satu potensi untuk mengatasi masalah kemiskinan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sering mengalami kegagalan karena mengabaikan aspek potensi lokal masyarakat.

Paradigma pembangunan dengan pendekatan *bottom up* (bawah atas) yang dianut pemerintah saat ini berimplikasi pada penerapan model dan strategi komunikasi pembangunan yang memadukan berbagai pendekatan komunikasi, baik linier maupun konvergen. Masyarakat kampung atau pedesaan di Papua perlu menerima informasi secara akurat, kredibel dan terbuka (transparan) sebagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini mengindikasikan bahwa, masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang tepat agar mereka dapat menjadi bagian dalam proses pembangunan. Penerapan komunikasi program pemberdayaan menjadi penting untuk diperhitungkan agar informasi tentang program dapat dikomunikasikan secara tepat sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan berpartisipasi pada setiap tahapan program.

Salah satu upaya memaksimalkan potensi energi sosial masyarakat adalah melalui penerapan komunikasi pembangunan

yang efektif dan tepat efisien. Masyarakat juga dituntut memiliki kesadaran kembali akan tujuan, menggali gagasan dan memanfaatkan ikatan solidaritas warga masyarakat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Interaksi sosial yang dinamis dalam kelompok masyarakat menjadi kekuatan yang dapat didayagunakan dalam mencapai tujuan pembangunan yaitu masyarakat yang berdaya, sejahtera dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Program pemberdayaan masyarakat di Papua dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua ditindaklanjuti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desentralisasi Urusan Pemerintahan dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Desentralisasi Fiskal. Melalui Undang-undang ini pemerintah daerah dan masyarakat memiliki kewenangan menentukan arah pembangunan dengan pendekatan desentralisasi. Hal ini berbeda dengan konsep pendekatan pembangunan sebelum era reformasi 1998 yang lebih mengedepankan pendekatan sentralistik dalam pelaksanaan pembangunan.

Berbagai alternatif program pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan di Papua, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di antaranya program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dilaksanakan tahun 1994-1998, Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK) dilaksanakan tahun 1998--2003, Program Pemberdayaan Desa (PPD) dilaksanakan tahun 2003-2007, PNPM PPD Respek tahun 2007, dan yang saat ini dilaksanakan adalah program PNPM Mandiri Respek yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007.

Pemerintah Provinsi Papua hingga akhir tahun 2012 telah mengalokasikan dana untuk 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua sebesar Rp 2,183 triliun. Tahun 2013 dana yang disalurkan pada program pemberdayaan berbasis kampung sebesar Rp 515 miliar. Dana ini disalurkan kepada 86 kelurahan, 3.919 kampung dan 437 distrik yang ada di 29 kabupaten/kota di wilayah paling timur di Indonesia ini. Sementara di tahun 2015 disalurkan dana sebesar Rp 500 miliar untuk 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua (BPMPK Provinsi Papua, 2015). Besarnya anggaran yang disalurkan dalam pelaksanaan program harusnya dapat memberikan informasi secara tepat kepada masyarakat agar partisipasi mereka dapat meningkat dalam proses pembangunan.

Masyarakat Papua adalah masyarakat multikultural dilihat dari keragaman suku, bahasa, adat istiadat, kearifan lokal dan pengetahuan lokal yang menjadi kekuatan (energi) sosial masyarakat dalam mendukung pembangunan. Chitnis (2005) melakukan penelitian peran komunikasi dalam pembangunan masyarakat dengan judul "*Communications For Empowerment and Participatory Development A Social Model Of Health In Jamkhed India*". Hasil penelitian menggambarkan bagaimana orang-orang berpartisipasi dalam pembangunan, menjadi komunikator dalam proses perubahan, terlibat dalam tindakan kolektif, dan memastikan kesehatan yang baik dan kemajuan sosial. Penelitian tersebut menggambarkan pula, bagaimana komunikasi menjadi sarana untuk pembangunan partisipatif. Secara khusus penelitian tersebut menjelaskan, bagaimana komunikasi merupakan bagian integral memberdayakan masyarakat, menyebarkan

informasi dan mengorganisir orang untuk melakukan aksi bersama.

Afrizal (2011) mengungkapkan bahwa dalam pengentasan kemiskinan diperlukan strategi baru yang bertumpu kepada penggunaan potensi sosial lokal untuk membantu orang miskin terbebas dari kemiskinannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah penelitian bagaimana peran komunikasi pembangunan dalam pengembangan energi sosial sebagai kekuatan lokal untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran komunikasi program dan tingkat komunikasi partisipatif dalam pengembangan energi sosial masyarakat; (2) menganalisis seberapa jauh hubungan peran komunikasi program dan tingkat komunikasi partisipatif terhadap energi sosial masyarakat. Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan pelaksanaan pembangunan dan juga bagi penelitian atau kajian akademis lain yang berkaitan dengan penerapan komunikasi dalam program pemberdayaan masyarakat.

Pentingnya akses informasi dalam pembangunan masyarakat sebagaimana ditekankan Bank Dunia (World Bank, 2006) bahwa, komunikasi pembangunan hendaknya menciptakan mekanisme untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi mengenai reformasi, memperkuat kemampuan klien untuk mendengarkan konstituen mereka dan bernegosiasi dengan para pemangku kepentingan, memberdayakan organisasi akar rumput untuk mencapai proses yang lebih partisipatif dan melakukan kegiatan komunikasi yang didasarkan pada penelitian akan kondisi masyarakat.

Hedebro (1982) menyatakan bahwa salah satu peran dari komunikasi dalam pembangunan adalah komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan membujuk nilai-nilai, sikap mental, dan perilaku yang menunjang pembangunan. Berkaitan dengan model komunikasi dalam pembangunan masyarakat, Tufte dan Mefalopulos (2009) menggunakan *Multi-track Model* yang berasal dari kebutuhan untuk menggabungkan kekayaan dan kompleksitas pendekatan operasional dan tantangan pembangunan ke dalam kerangka komunikasi metodologis yang konsisten. Untuk menyorot fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai situasi, model ini membagi pendekatan untuk komunikasi menjadi dua kategori dasar, yaitu komunikasi monologis dan komunikasi dialogis. Komunikasi monologis merupakan pendekatan komunikasi satu arah seperti penyebaran informasi, kampanye media, dan pendekatan difusi lainnya. Sementara pendekatan komunikasi dialogis mengacu pada komunikasi dua arah, yakni proses dan *output* yang bersifat terbuka dapat berakhir pada ruang lingkup yang membahas isu-isu dan menghasilkan pengetahuan baru dan solusi bukan hanya mengirimkan informasi.

Salah satu definisi tentang energi sosial adalah kehangatan emosional dan dukungan pengembangan identitas diri. Oleh karena itu, energi sosial ini berbeda dari energi fisik yang berasal dari makanan dan sumber energi lainnya yang digunakan manusia untuk beraktivitas di lingkungan mereka (Faucher, 2010).

Energi sosial dapat dikatakan sebagai energi yang menyebabkan ego struktur untuk tumbuh. Ego struktur ini harus dipahami sebagai energi sosial yang terwujud dari hasil

kontak kelompok, proses yang dinamis, dan konflik. Fitur penting dari hubungan kelompok yang dinamis ini adalah membuat orang lain lebih perhatian, baik dari segi penerimaan dan penolakan. Dengan demikian energi sosial adalah faktor motivasi dari proses perkembangan dari setiap individu. Identitas adalah jumlah total energi sosial yang telah diterima sampai sekarang, baik dalam kuantitatif maupun dalam kualitatif (Buda, 2007).

Menjadi relevan untuk mengaitkan strategi pengentasan kemiskinan dengan konsep energi sosial budaya (disebut energi sosial) yaitu, suatu kekuatan internal pada tingkat lokalitas (komunitas). Konsep energi sosial ini menunjuk pada tiga aspek yaitu: (a) gagasan (*ideas*) dasar yang disepakati tentang suatu tujuan positif, (b) harapan atau cita-cita (*ideal*) yang disepakati tentang wujud mencapai tujuan itu, dan (c) kebersamaan (*friendship*) dalam upaya mencapai tujuan itu berdasarkan konsep Uphoff (1987), dan Sayogjo (1994) energi sosial terdapat pada satuan lokalitas dalam bentuk pranata-pranata yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Pentingnya peran komunikasi yang efektif untuk komunikasi pembangunan pedesaan ditandai dengan partisipasi masyarakat. Masyarakat diberdayakan dengan informasi dan merupakan bagian dari identifikasi kebutuhan mereka, tantangan, rencana intervensi, implementasi, monitoring, dan evaluasi di lingkungan yang kondusif untuk mereka mengambil isu-isu pembangunan tangan mereka sendiri. Dengan menjadi peserta aktif dan pemilik dari keseluruhan proses, ini berarti bahwa anggota masyarakat yang dibujuk untuk mengambil masalah pembangunan mereka ke tangan mereka sendiri. Mereka juga dibuat untuk

bertanggung jawab kepada yang ada inisiatif perkembangan (Chamber, dalam Rasila dan Mudau, 2012).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kuantitatif deskriptif dengan sampel wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan teknik *cluster sampling*. Kedua wilayah tersebut dianggap dapat mewakili topografi daerah dan masyarakat yang heterogen, yaitu masyarakat pesisir pantai dan masyarakat dataran/lembah/pedalaman. Distrik Abepura Kota Jayapura mengambil lokasi di Kampung Enggros dan Kampung Nafri. Selanjutnya Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura mengambil lokasi di Kampung Nolakla dan Kampung Itakiwa. Total populasi sebesar 1.803 kepala keluarga.

Berdasarkan teknik penarikan sampel dengan rumus *Isaac dan Michael* (Sugiyono, 2013) pada tingkat kesalahan 5 % diperoleh jumlah sampel sebanyak 300 orang kepala keluarga dengan rincian 123 responden berasal dari Kota Jayapura dan 177 responden dari Kabupaten Jayapura.

Pemilihan sampel dilakukan secara acak di mana sampel yang menjadi responden telah mendapat *treatment* (perlakuan) khusus di antara lain: (1) mengetahui tentang program pemberdayaan; (2) pernah terlibat dalam kegiatan program pemberdayaan, baik yang sudah dilakukan maupun yang sedang dilakukan.

Penelitian ini memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer dibedakan menjadi dua, yaitu; data gambaran umum objek penelitian dan data untuk melihat hubungan faktor internal, dan eksternal dengan penerapan komunikasi partisipatif dalam

pemberdayaan masyarakat, serta untuk menganalisis pengembangan energi sosial budaya masyarakat dan keberdayaan masyarakat di Provinsi Papua.

Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi. Analisis statistik inferensial digunakan menguji hubungan antarpeubah penelitian dengan analisis regresi linier berganda dan model persamaan struktural menggunakan SEM (*Structural Equation Model*), yang dioperasikan melalui program lisrel 8.30. Didukung program SPSS 18 untuk melihat distribusi frekuensi responden serta analisis korelasi untuk melihat hubungan antarvariabel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan komunikasi program pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura di Papua, tergolong rendah. Hal ini terefleksikan pada rendahnya peran pendamping (62.0%) pada kategori rendah, ketepatan informasi (69.7%) pada kategori rendah, dan partisipasi komunikasi (60,3%) pada kategori rendah kecuali ketepatan saluran (46,3%) pada kategori sedang. Kondisi ini menggambarkan bahwa komunikasi program pada program pemberdayaan masyarakat belum efektif dalam meningkatkan pengembangan energi sosial. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa penerapan komunikasi yang dilakukan pemerintah baru pada tahap penyampaian informasi program yang bersifat searah, belum pada tahap memberikan pemahaman dan peningkatan kesadaran masyarakat akan potensi energi sosial yang dimiliki sebagai daya dukung pembangunan masyarakat.

Pendekatan pembangunan partisipatif yang mengedepankan dialog dalam pelaksanaan pembangunan belum dioptimalkan sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan rasa percaya diri akan potensi atau kemampuan yang dimiliki masyarakat. Pendekatan pembangunan yang bersifat sentralistik selama ini telah mendegradasi nilai budaya, kearifan lokal, dan pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat. Hal ini membuat masyarakat semakin hilang kepercayaan diri untuk membangun dirinya, menetapkan tujuan mencapai kesejahteraan, menumbuhkan gagasan yang inovatif maupun memanfaatkan solidaritas sosial untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah pada dialog atau musyawarah program menjadi salah satu indikator komunikasi yang kurang efektif dari pengelola program

kepada masyarakat. Masyarakat pedesaan dengan berbagai keterbelakangan yang mereka miliki baik tingkat pendidikan, keterbatasan prasarana dan sarana, akses informasi yang terbatas, maupun rendahnya *skill* atau kemampuan membuat kualitas sumberdaya manusia menjadi rendah. Karena itu dibutuhkan pendampingan bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan agar masyarakat mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan. Zolfaghari (2009) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, partisipasi masyarakat memberi kontribusi bagi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat memungkinkan program untuk melakukan tugas mereka dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Gambaran sebaran responden pada komunikasi program berdasarkan indikator dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran dan Rataan Masyarakat di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura di Papua Berdasarkan Peubah Komunikasi Program

Indikator Komunikasi Program	Kota Jayapura (%)		Kabupaten Jayapura (%)		Total (%)	
	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
Peran pendamping	54,5	45,5	67,3	32,8	62,0	38,0
Ketepatan informasi	59,4	40,6	76,3	22,6	69,7	30,0
Ketepatan saluran	49,5	50,4	44,1	55,9	46,3	53,7
Partisipasi komunikasi	50,4	49,6	67,8	32,2	60,7	39,3
Rataan skor	57,3		56,7		57,0	

Sumber : Hasil Olahan Peneliti. 2017.

Pada aspek peran pendamping tergolong rendah disebabkan oleh rendahnya peran dalam program pemberdayaan masyarakat terefleksi pada peran fasilitasi, peran pendidikan, peran penyadaran dan kredibilitas pendamping. Intensitas pendampingan masih rendah sehingga masyarakat sulit menyampaikan pendapat, aspirasi, usulan atau saran. Peran pendamping dalam melakukan

pendampingan kepada masyarakat tidak berkesinambungan. Dengan kata lain, pendampingan kepada masyarakat dilakukan hanya ketika kegiatan program pemberdayaan berlangsung, sedangkan saat program tidak lagi berjalan terhenti pula kegiatan pendampingan yang dilakukan pendamping. Dari wawancara mendalam, peran pendamping perlu ditingkatkan dari aspek kualitas atau

kemampuan pendamping. Hal ini karena masih ditemui kemampuan pendamping tergolong rendah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan program dan dalam melakukan transfer pengetahuan serta fasilitasi akan peluang kerjasama kepada pihak yang terkait. Selain itu kemampuan pendamping masih rendah dalam beradaptasi dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Sementara itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam dialog atau musyawarah terjadi karena rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pendamping disebabkan oleh: perbedaan sosial budaya, tidak komunikatif, bersifat doktriner, mendominasi, sikap atau kepribadian yang kurang baik dan kurang adaptif dengan lingkungan sosial masyarakat.

Potensi masyarakat rendah dapat dilihat dari angka melek huruf di Papua pada taraf 70,83 (<http://www.bps.go.id>) terendah dibanding daerah lain di Indonesia. Kondisi ini menjadi indikasi rendahnya kemampuan masyarakat dalam meningkatkan keberdayaan. Firmansyah (2012) mengatakan, fasilitator atau pendamping program pemberdayaan sangat menentukan tingkat keberdayaan masyarakat yang menjadi sasaran program. Tanpa keberadaan pendamping, masyarakat akan sulit untuk melakukan kegiatan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki.

Ketepatan informasi pada kategori rendah menunjukkan bahwa ketepatan informasi tergolong rendah, terrefleksi pada kesesuaian informasi, keakuratan informasi dan ketercukupan informasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Dari wawancara mendalam terungkap, informasi yang diterima masyarakat umumnya lebih bersifat penyampaian pesan searah (linier) yang mengandung unsur instruksi (pengarahan) tentang kegiatan yang harus dilakukan

masyarakat. Padahal, masyarakat menginginkan informasi dua arah (konvergen) di mana pesan yang disampaikan sesuai dengan potensi, kondisi, dan kebutuhan spesifik lokal masyarakat. Oleh karena itu, penyampaian informasi hendaknya mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Penyampaian informasi dalam program pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh unsur-unsur pemerintah terkait seperti lembaga/badan/dinas, didukung oleh aparat pemerintah, pendamping Program, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat.

Ketepatan saluran pada kategori sedang, menunjukkan bahwa ketepatan saluran dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura tergolong cukup baik. Hal tersebut tercermin dari komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Komunikasi interpersonal dilakukan masyarakat dengan pendamping program, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, tim pelaksana kampung, dan tim pelaksana distrik. Komunikasi kelompok melalui kelompok atau wadah masyarakat yang berfungsi sebagai penampung aspirasi, memfasilitasi kepentingan warga, wadah silaturahmi antarwarga, sarana sosialisasi pemerintah, dan sarana pembelajaran bersama masyarakat. Saluran komunikasi massa dilakukan melalui saluran media massa, baik cetak maupun elektronik, seperti koran, televisi, radio, koran dan buletin pemda, brosur, selebaran, dan papan pengumuman yang menginformasikan kegiatan program pemberdayaan yang dilakukan oleh

pemerintah melalui lembaga pemerintah terkait.

Partisipasi komunikasi masyarakat pada dialog atau musyawarah program tergolong rendah. Kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat belum dapat berpartisipasi aktif pada tahapan dialog atau musyawarah program pemberdayaan. Dialog dilakukan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap menikmati hasil atau manfaat dari program pemberdayaan. Tersedianya ruang untuk berdialog atau musyawarah seharusnya dapat dimanfaatkan semua warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keinginan dan kebutuhan yang mereka inginkan. Wawancara mendalam dengan salah seorang pendamping terungkap bahwa sangat sulit untuk mengajak warga terlibat dalam dialog atau musyawarah karena mereka umumnya berpikir dialog atau musyawarah tidak memberikan manfaat langsung yang bisa dirasakan sehingga dialog hanya dihadiri oleh orang yang sama. Hal ini terjadi karena sifat egois yang tinggi dari kelompok tertentu yang menganggap kepentingannya lebih penting dibanding kelompok lain. Akibatnya, warga lain tidak ingin terlibat dalam dialog karena menganggap kepentingannya tidak diakomodasi. Selain itu, ketidakpahaman masyarakat akan manfaat dari dialog atau musyawarah juga menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat pada dialog atau musyawarah. Strategi yang dilakukan oleh pendamping adalah dengan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan adat setempat agar masyarakat mau berpartisipasi pada dialog atau musyawarah program pemberdayaan.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan sebagaimana dijelaskan (Kakumba, 2010) yaitu untuk

menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan penyegaran peran masyarakat setempat dalam memobilisasi sumberdaya, adanya akuntabilitas dari pemimpin lokal, berpartisipasi dalam perencanaan dan memilih pemimpin tanpa manipulasi dari elit pemerintah dan lokal. Dengan demikian, partisipasi harus diterjemahkan kedalam representasi dan pemberdayaan yang efektif sebelum manfaat untuk banyak orang dapat direalisasikan sebagai ujung tombak penanggulangan kemiskinan.

Tingkat komunikasi partisipatif pada dialog atau musyawarah program pemberdayaan masyarakat dari hasil penelitian tergolong rendah, terrefleksikan pada kesetaraan komunikasi, integrasi komunikasi dan interdependensi komunikasi pada dialog atau musyawarah program pemberdayaan. Analisis responden menunjukkan bahwa kesetaraan komunikasi tergolong rendah (58,0%) pada kategori rendah, integrasi komunikasi (53,0%) pada kategori rendah dan interdependensi komunikasi (56,7%) pada kategori rendah. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat komunikasi partisipatif pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura Papua belum partisipatif. Dengan kata lain, masyarakat belum mendapatkan kendali atau kewenangan dalam menetapkan tujuan, gagasan maupun pengembangan jaringan pertemanan sebagai wujud pengembangan energi social masyarakat. Melkote dan Steeves (2001) bahwa peran komunikasi untuk pembangunan tidak hanya transmisi informasi dan ide-ide tentang pembangunan, tetapi cara di mana orang mendapatkan kendali atas kehidupan mereka. Sebaran responden pada masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran dan Rataan Masyarakat di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura Papua Berdasarkan Peubah Tingkat Komunikasi Partisipatif

Indikator Komunikasi Partisipatif	Kota Jayapura (%)		Kabupaten Jayapura (%)		Total (%)	
	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
Kesetaraan Komunikasi	61,0	39,0	52,0	48,0	55,6	44,3
Integrasi Komunikasi	55,3	44,7	51,4	48,6	53,0	47,0
Interdependensi Komunikasi	50,4	49,6	61,0	39,0	56,7	43,3
Rataan skor	55,4		56,6		56,0	

Sumber : Hasil Olahan Peneliti. 2017.

Pada tabel di atas terlihat bahwa aspek interdependensi komunikasi tergolong paling rendah disusul oleh kesetaraan komunikasi dan integrasi komunikasi. Kesetaraan komunikasi tergolong rendah menjelaskan bahwa, masyarakat kurang mendapat kesetaraan yang sama dalam dialog atau musyawarah program. Walaupun mereka hadir untuk memenuhi kuorum tanpa dilibatkan dalam penentuan kesepakatan, merancang kegiatan, penentuan anggaran dan keterlibatan dalam susunan kepanitiaan. Di samping itu, masyarakat kurang mendapat kesetaraan yang sama untuk menyampaikan usulan atau masukan, kesempatan terlibat dalam pengambilan keputusan sebagai akibat dominasi pihak tertentu. Wawancara mendalam menjelaskan bahwa dominasi elit masih terjadi pada dialog atau musyawarah program, baik oleh tokoh masyarakat atau adat maupun kaum intelektual sehingga masyarakat kampung dengan tingkat pengetahuan yang rendah tidak mampu berpartisipasi secara aktif dalam dialog atau musyawarah program. Selain itu, usulan yang diakomodasi seringkali usulan yang telah ditetapkan sebelumnya, tetapi belum mendapatkan pendanaan, bukan menggali kembali gagasan baru dari masyarakat. Rendahnya kesetaraan komunikasi disebabkan oleh rendahnya karakteristik individu, seperti

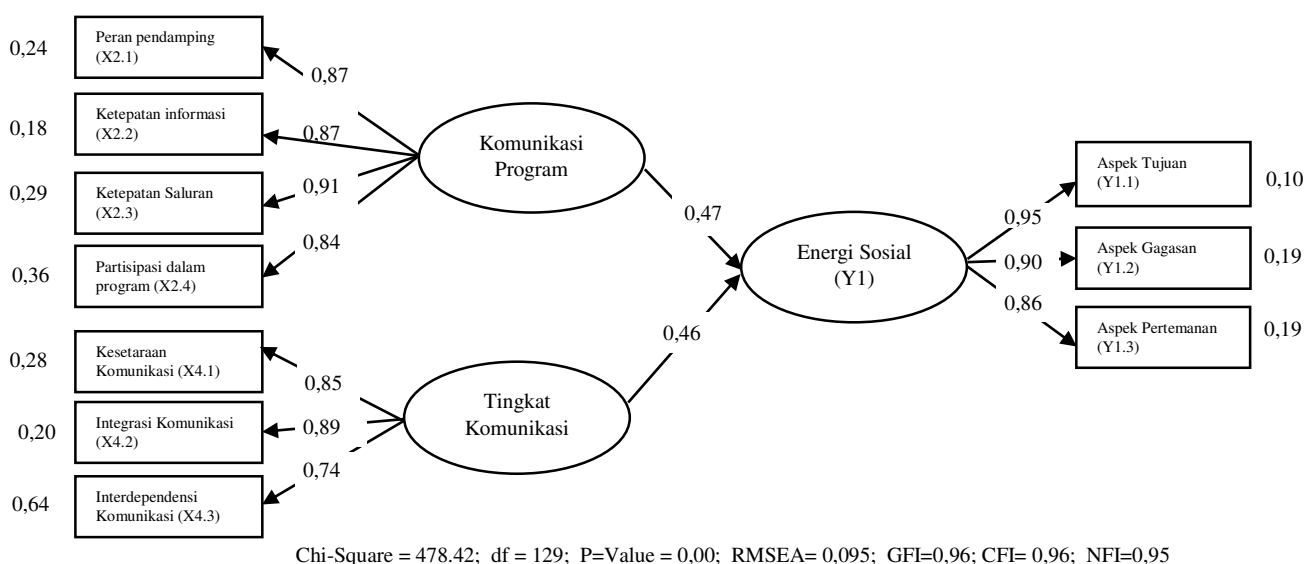
usia lanjut, tingkat pendidikan rendah, akses informasi yang terbatas, kemampuan berkomunikasi yang kurang baik. Untuk itu, perlu adanya perbaikan dari pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga tumbuh kepercayaan diri masyarakat terlibat dalam dialog atau musyawarah pada setiap tahap kegiatan.

Integrasi komunikasi tergolong rendah. Hal ini menggambarkan bahwa komunikasi partisipatif yang berlangsung pada program pemberdayaan belum mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Dialog atau musyawarah program biasanya lebih menitikberatkan pada program yang memberikan manfaat langsung dirasakan (jangka pendek) dibanding dengan program jangka panjang. Integrasi komunikasi pada dialog atau musyawarah program meliputi pembelajaran bersama, saling berbagi informasi di antara anggota masyarakat, keterpaduan berbagai bidang atau aspek, keterpaduan pengetahuan lokal dengan tenaga ahli, berbagi informasi antara masyarakat dengan pendamping, dukungan terhadap integrasi dari berbagai aspek dari masyarakat. Indikator integrasi komunikasi merupakan salah satu aspek yang penting mengingat seringkali terjadi disintegrasi kepentingan di antara anggota masyarakat sebagai akibat ego

pribadi maupun kelompok yang menganggap kepentingan mereka lebih penting dibanding kelompok lain.

Interdependensi komunikasi tergolong rendah. Hal ini menggambarkan bahwa dialog atau musyawarah program belum mampu menciptakan ketergantungan diantara sesama warga pada dialog atau musyawarah program. Aspek ketergantungan tercermin dari aspek dukungan pihak lain, dukungan moril dan materiil pelaksanaan dialog atau musyawarah program, memberi dukungan dalam pengambilan keputusan bersama, terlibat bersama dalam penyusunan usulan program, terlibat bersama dalam penyusunan anggaran, bekerjasama dengan pendamping untuk mendukung kelancaran dialog atau program. Rendahnya ketergantungan dapat mempengaruhi target dari pencapaian tujuan dari dialog atau musyawarah yang dilakukan, karena masing-masing pihak kurang memberikan toleransi, saling berbagi, empati, saling menghargai dan menerima keputusan bersama.

Komunikasi dalam program pemberdayaan masyarakat menunjukkan pengaruh positif antara variabel komunikasi program dan tingkat komunikasi partisipatif dengan energi sosial budaya masyarakat. Gambar 1 memperlihatkan usaha meningkatkan komunikasi program dilakukan dengan meningkatkan peran pendamping, ketepatan informasi, ketepatan saluran dan partisipasi masyarakat dalam program, sedangkan peningkatan energi sosial masyarakat melalui komunikasi partisipatif dilakukan dengan meningkatkan kesetaraan komunikasi, integrasi komunikasi dan interdependensi komunikasi pada dialog atau musyawarah program pemberdayaan masyarakat. Analisis *Structural Equation Model* (SEM) menunjukkan pengaruh positif peubah komunikasi program dengan energi sosial yang ditunjukkan dengan nilai koefisien pengaruh sebesar 0,47 dan tingkat komunikasi partisipatif dengan energi sosial dengan nilai koefisien pengaruh sebesar 0,46. Hasil analisis SEM terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Model *Standardized* Peran Komunikasi dalam Pengembangan Energi Sosial Masyarakat

Dari gambar tersebut terlihat bahwa peubah komunikasi program merupakan faktor penentu yang memiliki koefisien pengaruh lebih besar terhadap pengembangan energi sosial yang terefleksikan pada peran pendamping, ketepatan informasi, ketepatan saluran, dan partisipasi komunikasi masyarakat. Sementara tingkat komunikasi partisipatif memiliki koefisien pengaruh terhadap energi sosial yang terefleksikan pada kesetaraan komunikasi, integrasi komunikasi dan interdependensi komunikasi masyarakat pada dialog atau musyawarah program pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menggambarkan bahwa energi sosial dapat dikembangkan bila komunikasi program dan tingkat komunikasi partisipatif juga semakin meningkat. Chitnis (2005) mengatakan komunikasi menjadi sarana ampuh untuk pembangunan partisipatif masyarakat. Komunikasi merupakan bagian integral untuk memberdayakan masyarakat, menyebarkan informasi dan mengorganisasi orang untuk melakukan aksi bersama.

Keterkaitan peran komunikasi dan energi sosial budaya masyarakat sebagaimana dijelaskan Sumardjo (1994) mengatakan kekuatan energi sosial dapat ditumbuhkan melalui komunikasi di antara pihak yang terkait. Komunikasi dapat membuka cakrawala pandangan dan pemikiran pada tokoh-tokoh (pengetua, tokoh agama, guru dan pamong desa) yang menjadi kunci sukses dalam proses pelestarian dinamisasi pembangunan di desa. Kekuatan internal masyarakat yang terwujud dalam nilai-nilai sosial masyarakat menjadi pedoman, bagaimana masyarakat menyikapi dan menghadapi setiap permasalahan yang terjadi untuk ketahanan sosial diri dan kelompoknya. Melalui peran komunikasi pembangunan dalam program pemberdayaan

masyarakat, kekuatan dari dalam masyarakat yang terwujud sebagai energi sosial budaya dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui gagasan atau pemikiran yang berasal dari masyarakat sendiri serta upaya meningkatkan jaringan kekerabatan diantara warga masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan komunikasi pembangunan dalam program pemberdayaan masyarakat masih rendah. Hal ini disebabkan kemampuan pendamping yang rendah, terutama pada kemampuan pendidikan atau kesadaran dan peran fasilitasi pada masyarakat. Wawancara mendalam menjelaskan, komunikasi yang intensif antara pemerintah dan masyarakat lebih ditingkatkan karena tidak semua masyarakat di pedesaan mudah mengakses informasi melalui media massa. Masyarakat banyak yang belum paham akan manfaat program yang dilakukan pemerintah. Mereka biasa ikut hadir karena ajakan teman atau tetangga, sehingga pada saat dialog atau musyawarah, mereka lebih banyak diam karena tidak tahu apa yang mesti dibicarakan. Oleh karena itu, pendamping sebagai fasilitator harus berperan bukan hanya memberi informasi tetapi juga tempat bagi warga untuk berkonsultasi atau tempat berbagi pengalaman. “Jika informasi hanya lewat media massa, agak sulit karena tidak semua kampung punya akses ke media massa. Pendamping sebaiknya tinggal juga di kampung bukan di kota, biasa mereka ada turun ke kampung kalau uang juga turun”, ungkap KD, salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Jayapura.

Penerapan komunikasi partisipatif pada program pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan bahwa, tahapan dialog atau musyawarah program telah dilakukan, namun

belum sepenuhnya partisipatif karena tidak semua anggota masyarakat terlibat pada setiap tahapan dialog atau musyawarah program pemberdayaan terutama pada tahap perencanaan program. Kondisi ini terjadi karenasikap masyarakat terbentuk dari pemahaman yang keliru tentang program sebagai akibat informasi yang kurang tepat atau akurat. Oleh karena itu, masyarakat kurang menyukai kegiatan yang bersifat prosedural, seperti rapat atau pertemuan, mereka lebih suka kegiatan yang sifatnya langsung dirasakan. Dalam banyak kesempatan, dialog atau musyawarah terlihat minim peserta. Dialog atau musyawarah lebih didominasi oleh elit masyarakat, dan kaum intelektual (terpelajar), dialog atau musyawarah. Kondisi ini dikarenakan, pengetahuan mereka lebih baik, lebih melek informasi, berpengalaman, serta berani dalam menyuarakan aspirasinya. Sebaliknya, sebagian masyarakat dengan keterbatasan mereka, seperti tingkat pendidikan rendah, minim informasi, tidak pandai berdialog, cenderung lebih banyak diam meski mereka tidak sepakat dengan apa yang diputuskan. Akibatnya, kadang terjadi sabotase pada kegiatan proyek-proyek sebagai bentuk protes mereka yang sebenarnya dapat disalurkan pada saat dialog atau musyawarah program.

KESIMPULAN DAN SARAN

Aspek komunikasi program pada program pemberdayaan di Papua tergolong rendah, yang terefleksikan pada peran pendamping, ketepatan informasi, ketepatan saluran komunikasi serta partisipasi komunikasi masyarakat. Hasil analisis *Structural Equation Model* (SEM) menunjukkan pengaruh positif komunikasi program dengan pengembangan energi sosial

budaya masyarakat di Papua. Tingkat komunikasi partisipatif pada program pemberdayaan tergolong rendah yang terefleksikan pada kesetaraan komunikasi, integrasi komunikasi dan interdependensi komunikasi. Terdapat hubungan yang nyata tingkat komunikasi partisipatif dengan pengembangan energi sosial budaya masyarakat dan keberdayaan masyarakat.

Komunikasi program dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan energi sosial masyarakat masih tergolong rendah, untuk itu pemerintah perlu melakukan peningkatan kualitas komunikasi pendamping dan pihak-pihak yang berkepentingan terutama pada peran edukasi dan peran koordinasi. Keterbatasan akses informasi dapat dilakukan dengan membuka jalur komunikasi informal, melalui peningkatan peran kelompok masyarakat yang ada. Tingkat komunikasi partisipatif yang rendah disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat pada dialog atau musyawarah program. Hal ini dapat ditingkatkan dengan memberikan kesetaraan yang sama bagi semua warga, meningkatkan keterpaduan kepentingan antar warga masyarakat serta menumbuhkan sikap ketergantungan diantara sesama warga pada dialog atau musyawarah program. Ruang-ruang dialog lebih diintensifkan bukan hanya saat ada kegiatan program, namun diluar jadwal atau siklus kegiatan sebagai upaya pengembangan potensi sosial lokal masyarakat yang selama ini telah terdegradasi dengan nilai-nilai dari luar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada para reviewer yang telah memberikan masukan baik berupa saran dan kritik untuk perbaikan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2011). *Gagalnya Program Anti Kemiskinan : Sebuah Analisis Sosiologis*. Working Paper. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (Unpublished)
<http://repository.unand.ac.id/2262/>
- Buda, B. (2007). *Social Energy – A Revolutionary Concept of Therapy and Its New Interpretations and Evidences*. Paper 15th World Congress of the World Association for Dynamic Psychiatry. St. Petersburg
- (BPMPK) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Provinsi Papua. 2015. Daerah sasaran program pemberdayaan masyarakat di Provinsi Papua.
- Chitnis, K. (2005). *Communication for Empowerment and Participatory Development : A Social Model of Health in Jamkhed*, India Dissertation The Faculty of The College of Communication of Ohio University.
- Faucher, J.B.P.L. (2010). *Reconceptualizing Knowledge Management : Knowledge, Social Energy, and Emergent Leadership in Social Complex Adaptive Systems*. A Thesis submitted for the degree of Docotr of Philosophy at the University of Otago, Dunedin, New Zealand.
- Firmansyah, H. (2012). *Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut*. Jurnal Agribisnis Pedesaan. Universitas Lambung Mangkurat.
- Hedebro, G. (1982). *Communication and Social Change in Developing Nations : a critical view*. Ames, Iowa State University Press.
- Kakumba, U. (2010). *Local Government Citizen Participation and Rural Development : Reflection on Uganda's decentralization system*. International Review of Administrative Sciences. Journal Sagepub. Vol 76 : Hal, 171-186
- Rasila, B.N. and Mudau, M.J. (2012). *Effective communication as A Strategic Tool for Rural Development: A model to take South African Government beyond mobilization and consultation through public participation*. Journal of Media and Communication Studies. Vol.4. No 7 : Hal 134-141.
- Sayogjo. (1994). *Kemiskinan dan Pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* Bandung. Alfabeta.
- Sumardjo. (1994). *"Kemiskinan dan Pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timar"*. Sayogyo (penyunting), Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- The World Bank, (2006). *World Development Report. Equity and Development*. Oxford University Press 198 Madison Avenue New York NY 10016.
- Tufte, Thomas. Mefalopulos, Paolo. (2009). *Participatory Communication. A Practical Guide*. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A.
-

Uphoff N. (1987). *Drawing on social energy in project implementation: A learning process experience in Sri Lanka*. Paper prepared for presentation at annual meeting of the American Society for Public Administration, Boston, March 30.

Zolfaghari, A. (2009). *The Factors Contributing to the Success of Community Learning Centers Program in Rural Community Literacy Development in the Islamic Republic of Iran: Case Studies of Two Rural Communities*. Proquest Journal, Asian Culture and History. Vol 1 No 2. Hal : 103-107